

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang nyata, bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan, kesenjangan dan percepatan pembangunan di tingkat Pekon;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

SKPD	KASAS HUKUM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PEKON
(ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;

SKPD	KABAG HUKUM
F.	F.

15. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
16. Alokasi Dana Pekon adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon dan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
18. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
20. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Peratin dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon;
21. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Bobot Pekon (BPx) adalah nilai Pekon yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent;
23. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Bobot Pekon (BPx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Pekon dengan Pekon Lainnya;
24. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Pekon yang meliputi Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Keterjangkauan;
25. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk seluruh Pekon, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat;
26. Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) untuk masing-masing Pekon adalah sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) seluruh Pekon dibagi jumlah Pekon definitif se-Kabupaten Lampung Barat;
27. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) se-Kabupaten Lampung Barat.



BAB II SUMBER PENDAPATAN PEKON

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Pekon terdiri dari :
 - a. pendapatan Asli Pekon yang meliputi hasil usaha Pekon, hasil kekayaan Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli Pekon yang sah;
 - b. bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. alokasi Dana Pekon (ADP);
 - d. bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Pekon dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

BAB III ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 3

Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember untuk membiayai program Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUJUAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 4

Tujuan Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah:

- a. menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Pekon;
- d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
- e. meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon;
- f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

SKPD	KABAG HUKUM

BAB V
PRINSIP KEBIJAKAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 5

Prinsip kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat adalah :

- a. pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- b. pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Pekon dalam APB Pekon;
- c. demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama;
- d. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. pemberdayaan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan mengedepankan unsur partisipasi masyarakat;
- f. prinsip pemerataan, 60% (enam puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibagikan kepada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Pekon definitif;
- g. adil, 40% (empat puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan besarnya berdasarkan perhitungan nilai bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu seperti Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP);
- h. seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB VI
PERHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 6

- (1) Plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk seluruh Pekon Se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) berdasarkan porsi pekon yang bersangkutan;
- (3) Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :
 - a. jumlah Kepala Keluarga Miskin tahun sebelumnya;
 - b. keterjangkauan Pekon;
 - c. jumlah target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - d. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - e. luas wilayah Pekon;
 - f. dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.

SKPD	KABAG HUKUM

Pasal 7

(1) Perhitungan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan rumus sebagai berikut :

- 60% Dana Pemerataan, dimana setiap Pekon memperoleh dana yang sama;
- 40% Dana Proporsional.

Adapun Rumus Dana Proporsional 40% adalah :

$$ADPx = ADPM + ADPPx$$

$$ADPPx = BPx * (ADPx - \Sigma ADPM)$$

$$BPx = a_1 KV1x + a_2 KV2x + a_3 KV3 + \dots + a_n KV n$$

$$KV1,2,\dots,x = \frac{V1,2,\dots,x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

ADP	:	Alokasi Dana Pekon
ADPM	:	Alokasi Dana Pekon Minimal / Merata (60%)
ADPP	:	Alokasi Dana Pekon Proporsional (40%)
BP	:	Bobot Pekon
KV	:	Koefisien Variabel (Kemiskinan, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Target PBB)
a	:	Angka bobot masing-masing Variabel <ul style="list-style-type: none">- Kemiskinan (0,3000)- Keterjangkauan (0,2900)- Luas Wilayah (0,1600)- Jumlah Penduduk (0,1400)- Target PBB (0,1100)
ΣVn	:	Jumlah angka variabel

(2) Besaran Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Lampung Barat dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Besaran Alokasi Dana Pekon sebagaimana terlampir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Pekon (ADP), Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP), Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis (Teknis) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN
4	Badan. PM & PP
5	Inspektorat
6	Bappeda
7	Din. PPKAD
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

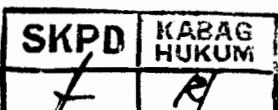
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 APRIL 2011
TENTANG : ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

I. SASARAN DAN LOKASI PENDANAAN

Sasaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Pekon definitif di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

II. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon sebagai berikut :

- a. Peratin sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bertanggungjawab secara administrasi dan hukum;
 - b. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - c. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah Perangkat Pekon yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Peratin, terdiri dari :
 - 1). Juru Tulis bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Pekon, menyusun Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun Rancangan Keputusan Peratin mengenai pelaksanaan Peraturan Pekon teritang APBP/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan bertanggungjawab kepada Peratin;
 - 2). Perangkat Pekon lainnya.
 - d. Peratin menetapkan Bendahara Pekon dengan Keputusan Peratin.
2. Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon (ADP) terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
3. Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Pekon;
4. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM);
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon berdasarkan Nilai Bobot Pekon (BPx) yang dihitung dengan rumus dan variabel Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga Miskin, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).

SKPD	KASAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, adalah besarnya ADPM adalah 60% (enam puluh prosen) dari jumlah ADP dan besarnya ADPP adalah 40% (empat puluh prosen) dari jumlah ADP.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pemberbiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Barat;
2. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 30% (tiga puluh prosen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Pekon dan 70% (tujuh puluh prosen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) digunakan untuk :
 - a. biaya Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan permukiman;
 - e. teknologi Tepat Guna (TTG);
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. pengembangan sosial budaya; dan
 - h. peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

IV. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;
2. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 50% (lima puluh prosen) tahap pertama dan 50% (lima puluh prosen) tahap kedua.
3. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) :
 - a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) / Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Alokasi Dana Pekon (ADP) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Bank Lampung Cabang Liwa selaku Pemegang Rekening Giro Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat ke Rekening Pekon di Bank Pemerintah yang ditunjuk.



V. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN

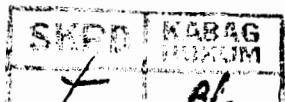
1. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pertanggungjawaban Anggaran Dana Pekon (ADP) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
3. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj.) pengeluaran Alokasi Dana Pekon (ADP) harus dilampiri dengan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu rincian, Obyek Penerimaan/Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. Bukti Atas Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara.

B. PELAPORAN

1. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja ADP;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADP.
2. Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui oleh Peratin kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
3. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
4. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

VI. TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

- ### A. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten
1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten;
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
 - c. Kabid. Pemerintahan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
 - d. Kasubbid. Kelembagaan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
 - e. 8 (delapan) orang dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait sebagai anggota



2. Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - c. merumuskan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
 - d. menyusun formulasi Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
 - g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
 3. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.
- B. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan
1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan, yaitu :
 - a. Camat sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
 - b. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
 - c. Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
 - d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan.
 2. Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk dicek silang dengan APB Pekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - e. merekomendasikan usulan pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;

- f. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum; dan
 - g. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing.
3. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran.

VII. TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP)

1. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) ditetapkan dengan Keputusan Peratin dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Peratin sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - b. juru Tulis sebagai Koordinator Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - c. kepala Urusan Pembangunan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - d. bendahara Pekon yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - e. para Kepala Urusan, para Kepala Pemangku dan 2 orang tokoh masyarakat di luar Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) sebagai anggota Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).
2. Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APBP;
 - b. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

VIII. VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Verifikasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
2. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi/Tim Verifikasi Kecamatan.

SKPD	KABAG HUKUM
F	M

IX. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Peratin;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi pengawasan; dan
 - c. Pengawasan masyarakat.
2. Pelaksana pengawasan
 - a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Bendahara Pekon oleh Peratin dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh aparat fungsional; dan
 - c. Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sewaktu-waktu jika diperlukan.

X. SANKSI

1. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP).
2. Kriteria untuk penetapan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten berupa pidana, denda atau mengganti kerugian; dan
3. Apabila pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang diberikan kepada Pekon tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
1 SEKDAKAB	/
2 ASSISTEN I	x
3 ASSISTEN	
4 Badar pm & PPP	x
5 Inspektorat	
6 Bappeda	/
7 DIN. PPKAO	/m
8	
9	
10 KABAG HUKUM	/

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 APRIL 2011
TENTANG : ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

I. TUJUAN

Tujuan Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah:

- a. menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pekon dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Pekon dan masyarakat Pekon melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP).

II. AZAS-AZAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

1. Azas-Azas yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM);
 - b. Azas Adil adalah besarnya Alokasi Dana Pekon (ADP) berdasarkan Nilai Bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, (seperti Kemiskinan tahun sebelumnya, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk tahun sebelumnya dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya), selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).
2. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 di atas, adalah besarnya Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM) adalah 60% (enam puluh prosen) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah 40% (empat puluh prosen) dari jumlah ADP.

III. PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

1. Belanja Aparatur dan Operasional sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari ADP digunakan untuk :
 - a. Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kemampuan keuangan Pekon, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) serendah-rendahnya sama dengan besaran yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2010;

SKPD	KABAG HUKUM

- b. Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) yang terdiri dari Juru Tulis selaku koordinator dan perangkat Pekon lainnya (Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan Kaur Pembangunan) sebagai anggota dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) diberikan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan sebesar :
 - 1. Penanggungjawab 1 Org x 12 bln : Rp. 35.000,-
 - 2. Koordinator 1 Org x 12 bln : Rp. 30.000,-
 - 3. Anggota 3 Org x 12 bln : Rp. 25.000,-
- c. Honor Bendahara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Peratin diberikan honor sebesar Rp. 75.000,-/ bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- d. Biaya Operasional Pemerintah Pekon, yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi anggaran serta memperhatikan kondisi Pekon dan kepentingan publik yang lebih besar, antara lain :
 - 1. Pengadaan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - 3. Biaya Operasional Lembaga Himpun Pemekonan (LHP); dan
 - 4. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
- 2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) digunakan untuk :
 - a. Bantuan Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melampirkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan;
 - b. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - c. Bantuan Biaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon paling banyak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik ADP dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan PKK Pekon;
 - d. Bantuan Biaya Kegiatan Posyandu Pekon paling banyak sebesar 5% (lima prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan melampirkan SK Peratin tentang Pembentukan Tim Pokja Posyandu Pekon dan SK Kader Posyandu Pekon;
 - e. Bantuan Biaya Operasional LPMP Pekon paling banyak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik ADP dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan Pengurus LPMP di Pekon masing-masing;

SKPD	KABAG HUKUM
/	H.

- f. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Pelaksanaan dan Personil yang diikutsertakan dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama LHP dan Aparat Pekon maksimal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Biaya penyertaan permodalan peningkatan pendapatan Pekon dan pendapatan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) yang berbadan hukum dan sudah berproduksi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan melampirkan Surat Izin Gangguan (RIG), SITU, SIUP, TDP dan Neraca Keuangan Usaha Milik Pekon;
- h. Menunjang Peningkatan Pembarugunan infrastruktur Pekon, dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKP) dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
- i. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Peratin paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- j. Bantuan Biaya Lomba Pekon Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan melampirkan SK Peratin tentang Tim Perlombaan Pekon;
- k. Bantuan Biaya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Pekon dan bukti-bukti lain pelaksanaan kegiatan;
- l. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna Pekon, Masyarakat Adat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Pekon paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang Pembentukan Karang Taruna dan bukti-bukti lain;
- m. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), disertai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan dilampiri Gambar sebelum dan sesudah dilakukan Perbaikan;
- n. Biaya Pengadaan Ketahanan Pangan / Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Pekon dapat dicadangkan (dana cadangan) yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon, baik penerimaan maupun pengeluarannya dan dapat berkelanjutan;
- o. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- p. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pelantikan Peratin Hasil Pemilihan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- q. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan yang ada di Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan bukti-bukti lainnya;
- r. Biaya penyediaan bahan bacaan untuk Pekon sebesar-besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

SKPD	KABAG HUKUM
X	RJ.

3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud Pasal 9, tidak diperbolehkan penggunaannya untuk :
 - a. Ganti Rugi Tanah;
 - b. Bangunan-Bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (Tugu Batas Desa, Gapura dan Taman);
 - c. Pengadaan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 - d. Peratin sebagai pelaksana kegiatan fisik dan non fisik;
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari Belanja Pemberdayaan Masyarakat tidak mengabaikan kegiatan non fisik Pemberdayaan Masyarakat lainnya berdasarkan skala prioritas; dan
 - f. Bendahara Pekon tidak diperbolehkan membayarkan uang dari Kas Pekon tanpa perintah tertulis dari Peratin (selaku Penanggungjawab TPTPKP) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Koordinator Tim (Juru Tulis) sesuai dengan kebutuhan saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

IV. STANDAR SATUAN HARGA

Mekanisme pembuatan Keputusan Peratin tentang Patokan Harga Satuan Pekerjaan per Kegiatan dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan serta Upah Pekerja di Pekon :

- a. Pemerintah Pekon melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai 5 (lima) toko;
- b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam musyawarah Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan keputusan Peratin;
- c. Keputusan Peratin tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Pekon; dan
- d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di Pekon dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang pemberbiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).

VI. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

1. Pengajuan Tahap I (kesatu) dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** Peraturan Bupati ini;
 - c. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - e. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) Tahap I (kesatu) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 5** Peraturan Bupati ini;
 - f. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) yang akan dilaksanakan pada Tahap I (kesatu) dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 5.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - g. Keputusan Peratin tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan SK Peratin tentang Pengangkatan Bendahara Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3** Peraturan Bupati ini;
 - h. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Besaran Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 7** Peraturan Bupati ini;
 - i. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap I (kesatu) yang dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan ditandatangani dan distempel Peratin diatas materai Rp. 6000,- sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 9** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - j. Foto copy Buku Rekening Bank Pekon pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;
 - k. Foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin;
 - l. Foto copy KTP Peratin dan Bendahara yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

- m. Kwitansi Penerimaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani Bendahara dan distempel Peratin di atas Rp. 6000,- (C.5) sebagaimana **Lampiran 11** Peraturan Bupati ini;
 - n. Surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - o. Berita acara hasil verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat sebagaimana **Lampiran 12** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap; dan
 - p. Usul yang dimaksud pada huruf a di atas, diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya, setelah ditetapkannya Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon.
2. Pengajuan Tahap II (kedua) dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :
- a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Tahap I (kesatu) pada Tahun Anggaran Berjalan;
 - c. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) Tahap II (kedua) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6** Peraturan Bupati ini;
 - d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) yang akan dilaksanakan pada Tahap II (kedua) dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - e. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap II (kedua) yang dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan, ditandatangani dan distempel Peratin di atas meterai Rp. 6000,- yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 9** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap, selambat-lambatnya Minggu Kedua Bulan Desember Tahun Anggaran 2011;
 - f. Surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - g. Foto copy KTP Peratin dan Bendahara yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

- h. Kwitansi Penerimaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani Bendahara dan distempel Peratin di atas meterai Rp. 6000,- (C.5) sebagaimana **Lampiran 11** Peraturan Bupati ini;
- i. Daftar tanda terima Pembayaran Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) (dari bulan Januari s.d bulan berjalan di SPJkan) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 7.2** Peraturan Bupati ini;
- j. Daftar Tanda Terima Pembaayaran Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dari bulan Januari 2011 s.d bulan berjalan di SPJkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 8** Peraturan Bupati ini;
- k. Bukti Setor PPN/PPH Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2011 kepada Kas Negara sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 13** Peraturan Bupati ini;
- l. Buku Kas Umum (BKU) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 14** Peraturan Bupati ini; dan
- m. Berita Acara Hasil Verifikasi / Penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat di atas meterai Rp. 6.000,-sebagaimana **Lampiran 12** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap.

VII. PENGENAAN PAJAK

1. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah / Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) diberikan secara penuh dan utuh ke Pekon tanpa pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pekon; dan
3. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Pekon (ADP) tersebut disetorkan oleh Peratin selaku penanggungjawab kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN SEBELUMNYA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk :

- a. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- b. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum diselesaikan;
- c. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
- d. Dana tersebut dibukukan dalam Rekening Kas Pekon dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

PARAF POKOK BAHASAN	
1. Sekuritas	✓
2. Assisten I	✓
3. Assisten	
4. Badan PM & PP	✓
5. Inspektorat	✓
6. Bappeda	✓
7. Dinas PPKAD	✓
8.	
9.	
10. Kabag Hukum	✓

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Lampiran III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 18 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 April 2011
 TENTANG : ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2011

BESARAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) PADA 247 PEKON
 UNTUK ALOKASI DANA PEKON MINIMAL (ADPM) / (60%) DAN
 ALOKASI DANA PEKON PROPORSIONAL (ADPM) / (40%)

NO	KECAMATAN PEKON / KELURAHAN	DPKPM	DPKPPx	JUMLAH
		60% (Rupiah)	40% (Rupiah)	ADP (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	SUMBERJAYA			
1	1 Simpang Sari	31,792,308	32,628,856	64,421,164
2	2 Sukapura	31,792,308	28,211,996	60,004,304
3	3 Way Petai	31,792,308	36,109,448	67,901,756
4	4 Sukajaya	31,792,308	21,105,516	52,897,824
5	5 Sindang Pagar	31,792,308	40,061,036	71,853,344
6	6 Tugu Sari	Kelurahan		
7	KEBUN TEBU			
7	1 Tribudi Syukur	31,792,308	19,729,517	51,521,825
8	2 Pura Jaya	31,792,308	26,076,051	57,868,359
9	3 Muara Jaya I	31,792,308	16,690,800	48,483,108
10	4 Muara Jaya II	31,792,308	17,092,867	48,885,175
11	5 Purawiwitan	31,792,308	22,226,607	54,018,915
12	6 Sinar Luas	31,792,308	15,749,578	47,541,886
13	7 Cipta Mulya	31,792,308	14,648,110	46,440,418
14	8 Tugu Mulya	31,792,308	12,929,389	44,721,697
15	9 Muara Baru	31,792,308	12,272,441	44,064,749
16	10 Tribudi Makmur	31,792,308	11,751,002	43,543,310
17	GEDUNG SURIAN			
17	1 Gedung Surian	31,792,308	28,871,863	60,664,171
18	2 Tri Mulyo	31,792,308	27,898,240	59,690,548
19	3 Cipta Waras	31,792,308	20,733,703	52,526,011
20	4 Pura Mekar	31,792,308	32,939,265	64,731,573
21	5 Mekar Jaya	31,792,308	32,982,486	64,774,794
22	WAY TENONG			
22	1 Puralaksana	31,792,308	28,888,566	60,680,874
23	2 Karang Agung	31,792,308	28,387,612	60,179,920
24	3 Mutar Alam	31,792,308	22,011,122	53,803,430
25	4 Tanjung Raya	31,792,308	23,833,698	55,626,006
26	5 Sukananti	31,792,308	26,984,801	58,777,109
27	6 Sukaraja	31,792,308	23,823,963	55,616,271
28	7 Padang Tambak	31,792,308	29,691,012	61,483,320
29	8 Tambak Jaya	31,792,308	24,978,259	56,770,567
30	9 Fajar Bulan	Kelurahan		
31	AIR HITAM			
31	1 Sri Menanti	31,792,308	14,921,920	46,714,228
32	2 Suka Damai	31,792,308	15,232,340	47,024,648
33	3 Manggarai	31,792,308	18,894,033	50,686,341
34	4 Rigit Jaya	31,792,308	16,276,348	48,068,656
35	5 Sinar Jaya	31,792,308	14,269,156	46,061,464
36	6 Sidodadi	31,792,308	15,675,949	47,468,257
37	7 Semarang Jaya	31,792,308	18,544,022	50,336,330
38	8 Sumber Alam	31,792,308	22,367,798	54,160,106
39	9 Gunung Terang	31,792,308	18,170,974	49,963,282
40	10 Sukajadi	31,792,308	14,822,399	46,614,707
41	SEKINCAU			
41	1 Pampangan	31,792,308	74,518,228	106,310,536
42	2 Giham Sukamaju	31,792,308	73,666,835	105,459,143
43	3 Sekincau	Kelurahan		
44	4 Waspada	31,792,308	32,594,317	64,386,625
45	5 Tiga Jaya	31,792,308	42,528,724	74,321,032

SKPD	KABAG HUKUM
C	C

	<u>VII</u>	<u>PAGAR DEWA</u>		
46	1	Mekar Sari	31,792,308	40,676,337
47	2	Sidomulyo	31,792,308	67,003,776
48	3	Pahayu Jaya	31,792,308	52,254,941
49	4	Basungan	31,792,308	58,456,249
50	5	Sidodadi	31,792,308	32,855,048
51	6	Batu Api	31,792,308	16,273,483
52	7	Suka Jaya	31,792,308	22,905,785
53	8	Pagar Dewa	31,792,308	22,639,077
54	9	Suka Mulya	31,792,308	17,887,290
55	10	Marga Jaya	31,792,308	20,803,169
	<u>VIII</u>	<u>SUOH</u>		
56	1	Tuguratu	31,792,308	32,048,013
57	2	Sukarnaga	31,792,308	31,839,222
58	3	Sumber Agung	31,792,308	24,185,564
59	4	Banding Agung	31,792,308	29,219,545
60	5	Roworejo	31,792,308	34,027,417
61	6	Sido Rejo	31,792,308	19,927,954
62	7	Ringin Sari	31,792,308	15,945,631
	<u>IX</u>	<u>BANDAR NEGERI SUOH</u>		
63	1	Bandar Agung	31,792,308	94,726,032
64	2	Srimulyo	31,792,308	21,620,535
65	3	Suoh	31,792,308	38,625,308
66	4	Bumi Hantatai	31,792,308	35,405,335
67	5	Gunung Ratu	31,792,308	18,503,526
68	6	Ringin Jaya	31,792,308	20,849,170
69	7	Tri Mekar Jaya	31,792,308	16,669,442
70	8	Tembelang	31,792,308	18,040,105
71	9	Negeri Jaya	31,792,308	17,188,519
72	10	Tanjung Sari	31,792,308	12,712,287
	<u>X</u>	<u>BELALAU</u>		
73	1	Kenali	31,792,308	54,692,520
74	2	Kejadian	31,792,308	13,643,999
75	3	Bumi Agung	31,792,308	11,608,653
76	4	Turgak	31,792,308	28,755,264
77	5	Bedudu	31,792,308	17,631,267
78	6	Sukarame	31,792,308	15,890,497
79	7	Hujung	31,792,308	33,597,029
80	8	Serungkuk	31,792,308	20,524,608
81	9	Suka Makmur	31,792,308	24,163,331
82	10	Pajar Agung	31,792,308	9,222,699
	<u>XI</u>	<u>BATU KETULIS</u>		
83	1	Bakhu	31,792,308	41,758,803
84	2	Luas	31,792,308	44,297,753
85	3	Argo Mulyo	31,792,308	36,052,858
86	4	Batu Kebayan	31,792,308	34,577,052
87	5	Atar Bawang	31,792,308	14,709,322
88	6	Campang Tiga	31,792,308	23,408,172
89	7	Way Ngison	31,792,308	12,996,087
90	8	Kubu Liku Jaya	31,792,308	12,010,586
91	9	Sumber Rejo	31,792,308	7,755,044
92	10	Atar Kuwau	31,792,308	13,397,993
	<u>XII</u>	<u>BATU BRAK</u>		
93	1	Negeri Ratu	31,792,308	15,008,290
94	2	Kembahang	31,792,308	17,335,537
95	3	Sukaraja	31,792,308	9,415,176
96	4	Gunung Sugih	31,792,308	9,271,057
97	5	Kegeringan	31,792,308	16,447,946
98	6	Canggu	31,792,308	13,617,422
99	7	Kota Besi	31,792,308	18,539,315
100	8	Sukabumi	31,792,308	17,921,746
101	9	Pekon Balak	31,792,308	13,495,921
102	10	Kerang	31,792,308	7,306,396
103	11	Teba Liokh	31,792,308	11,335,617

	XIII	SUKAU			
104	1	Tanjung Raya	31,792,308	47,018,172	78,810,480
105	2	Hanakau	31,792,308	24,702,529	56,494,837
106	3	Buay Nyerupa	31,792,308	43,469,473	75,261,781
107	4	Tapak Siring	31,792,308	27,288,487	59,080,795
108	5	Pagar Dewa	31,792,308	20,815,966	52,608,274
109	6	Jaga Raga	31,792,308	21,031,896	52,824,204
110	7	Suka Mulya	31,792,308	18,912,327	50,704,635
111	8	Bandar Baru	31,792,308	20,940,653	52,732,961
112	9	Bumi Jaya	31,792,308	15,207,577	46,999,885
113	10	Teba Fering Raya	31,792,308	19,002,922	50,795,230
	XIX	LUMBOK SEMINUNG			
114	1	Suka Banjar	31,792,308	13,420,022	45,212,330
115	2	Lombok	31,792,308	17,351,710	49,144,018
116	3	Heni Arong	31,792,308	16,901,683	48,693,991
117	4	Suka Banjar II UR	31,792,308	19,752,005	51,544,313
118	5	Lombok Timur	31,792,308	14,681,336	46,473,644
119	6	Tawan Suka Mulya	31,792,308	11,994,664	43,786,972
120	7	Ujung	31,792,308	14,053,551	45,845,859
121	8	Kagungan	31,792,308	7,985,119	39,777,427
122	9	Suka Maju	31,792,308	7,949,832	39,742,140
123	10	Lombok Selatan	31,792,308	7,157,299	38,949,607
124	11	Pancur Mas	31,792,308	10,637,275	42,429,583
	XV	PESISIR TENGAH			
125	1	Way Redak	31,792,308	12,413,043	44,205,351
126	2	Seray	31,792,308	16,716,042	48,508,350
127	3	Kampung Jawa	31,792,308	17,250,563	49,042,871
128	4	Rawas	31,792,308	14,601,778	46,394,086
129	5	Suka Negara	31,792,308	11,640,700	43,433,008
130	6	Pahmungan	31,792,308	15,113,940	46,906,248
131	7	Pasar Kru		Kelurahan	
132	8	Pasar Kota Kru		Kelurahan	
	XVI	WAY KRUI			
133	1	Pajar Bulan	31,792,308	9,000,288	40,792,596
134	2	Bumi Waras	31,792,308	8,052,422	39,844,730
135	3	Penggawa Lima Ilir	31,792,308	11,509,561	43,301,869
136	4	Banjar Agung	31,792,308	8,416,155	40,208,463
137	5	Ulu Krui	31,792,308	15,974,340	47,766,648
138	6	Gunung Kemala	31,792,308	14,955,198	46,747,506
139	7	Suka Baru	31,792,308	11,685,490	43,477,798
140	8	Labuhan Mandi	31,792,308	11,687,242	43,479,550
141	9	Gunung Kemala Timur	31,792,308	9,687,215	41,479,523
142	10	Penggawa Lima	31,792,308	8,077,129	39,869,437
	XVII	KRUI SELATAN			
143	1	Balai Kencana	31,792,308	17,640,444	49,432,752
144	2	Way Suluh	31,792,308	14,018,683	45,810,991
145	3	Way Napal	31,792,308	13,806,839	45,599,147
146	4	Padang Haluan	31,792,308	13,633,811	45,426,119
147	5	Lintik	31,792,308	14,464,974	46,257,282
148	6	Walur	31,792,308	8,149,828	39,942,136
149	7	Pemerihan	31,792,308	10,954,298	42,746,606
150	8	Mandiri Sejati	31,792,308	7,942,544	39,734,852
151	9	Padang Raya	31,792,308	10,343,200	42,135,508
152	10	Sukajadi	31,792,308	9,496,861	41,289,169
	XVIII	PESISIR SELATAN			
153	1	NR Tenumbang	31,792,308	13,714,402	45,506,710
154	2	Sukarame	31,792,308	8,330,105	40,122,413
155	3	Pelita Jaya	31,792,308	12,410,029	44,202,337
156	4	Sumur Jaya	31,792,308	15,365,387	47,157,695
157	5	Tanjung Jati	31,792,308	7,428,955	38,221,263
158	6	Pagar Dalam	31,792,308	7,910,109	39,702,417
159	7	Tanjung Setia	31,792,308	14,307,501	46,099,809
160	8	Biha	31,792,308	20,804,508	52,596,816

161	9	Way Jambu	31,792,308	16,221,214	48,013,522
162	10	Marang	31,792,308	39,518,658	71,310,966
163	11	Tanjung Raya	31,792,308	11,542,258	43,334,566
164	12	Bangun Negara	31,792,308	12,374,146	44,166,454
165	13	Ulok Manik	31,792,308	12,844,299	44,636,607
166	14	Paku Negara	31,792,308	19,161,546	50,953,854
167	15	Tulung Bamban	31,792,308	9,657,939	41,450,247
XIX PESISIR UTARA					
168	1	Wafulur	31,792,308	19,172,370	50,964,678
169	2	Padang Rindu	31,792,308	14,836,724	46,629,032
170	3	Kuripan	31,792,308	15,302,919	47,095,227
171	4	Negeri Ratu	31,792,308	19,845,513	51,437,821
172	5	Kerbang Langgar	31,792,308	18,822,869	50,615,177
173	6	Kerbang Dalam	31,792,308	14,171,740	45,964,048
174	7	Balam	31,792,308	15,961,430	47,753,738
175	8	Way Narta	31,792,308	14,529,446	46,321,754
176	9	Kota Karang	31,792,308	19,996,759	51,789,067
177	10	Batu Raja	31,792,308	16,261,018	48,053,326
178	11	Pasar Pulau Pisang	31,792,308	17,232,559	49,024,867
179	12	Labuhan	31,792,308	16,126,621	47,918,929
180	13	Sukadana	31,792,308	13,498,088	45,290,396
181	14	Sukamarga	31,792,308	12,105,869	43,898,177
182	15	Pekon Lok	31,792,308	10,970,115	42,762,423
183	16	Bandar Dalam	31,792,308	12,243,679	44,035,987
184	17	Pemancar	31,792,308	16,926,792	48,719,100
185	18	Gedau	31,792,308	15,336,783	47,129,091
XX LEMONG					
186	1	Pagar Dalam	31,792,308	18,801,104	50,593,412
187	2	Bambang	31,792,308	19,486,452	51,278,760
188	3	Tanjung Jati	31,792,308	14,051,463	45,843,771
189	4	Way Batang	31,792,308	16,302,490	48,094,798
190	5	Rata Agung	31,792,308	34,237,053	66,029,361
191	6	Lemong	31,792,308	29,351,512	61,143,820
192	7	Penengahan	31,792,308	33,657,948	65,450,256
193	8	Malaya	31,792,308	27,162,676	58,954,984
194	9	Cahaya Negeri	31,792,308	15,657,714	47,450,022
195	10	Bandar Pugung	31,792,308	18,245,306	50,037,614
196	11	Tanjung Sakti	31,792,308	13,057,307	44,849,615
197	12	Suka Mulya	31,792,308	17,466,262	49,258,570
198	13	Parda Haga	31,792,308	13,374,776	45,167,084
XXI KARYA PENGGAWA					
199	1	Menyancang	31,792,308	12,650,018	44,442,326
200	2	Penggawa V Tengah	31,792,308	11,483,037	43,275,345
201	3	La'ay	31,792,308	11,325,278	43,117,586
202	4	Penggawa V Ulu	31,792,308	14,845,952	46,638,260
203	5	Penengahan	31,792,308	18,639,680	50,431,988
204	6	Kebuayan	31,792,308	10,053,729	41,846,037
205	7	Way Nukak	31,792,308	12,462,008	44,254,316
206	8	Way Sindi	31,792,308	20,170,002	51,962,310
207	9	Way Sindi Utara	31,792,308	11,426,914	43,219,222
208	10	Tembakak Way Sindi	31,792,308	14,379,053	46,171,361
209	11	Way Sindi Hanuan	31,792,308	10,570,324	42,362,632
210	12	Asahan Way Sindi	31,792,308	13,597,869	45,390,177
XXII BALIK BUKIT					
211	1	Bahway	31,792,308	36,649,784	68,442,092
212	2	Padang Dalom	31,792,308	12,422,252	44,214,560
213	3	Sukarame	31,792,308	26,670,842	58,463,150
214	4	Sebarus	31,792,308	17,380,938	49,173,246
215	5	Watas	31,792,308	15,107,103	46,899,411
216	6	Way Empulau Ulu	31,792,308	18,488,517	50,280,825
217	7	Gunung Sugin	31,792,308	13,216,842	45,009,150
218	8	Pasar Liwa	Kelurahan		
219	9	Kubu Perahu	31,792,308	18,080,139	49,872,447

SKPD	KABAG HUKUM

220	10	Padang Cahya	31,792,308	39,902,036	71,694,344
221	11	Way Mengaku	Kelurahan		
222	12	Sedampah Indah	31,792,308	18,580,946	50,373,254
XXIII BENGKUNAT					
223	1	Parda Suka	31,792,308	19,810,303	51,602,611
224	2	Negeri Ratu Ngaras	31,792,308	23,289,869	55,082,177
225	3	Kota Batu	31,792,308	21,747,097	53,539,405
226	4	Mulang Maya	31,792,308	17,931,058	49,723,366
227	5	Raja Basa	31,792,308	23,484,478	55,276,786
228	6	Padang Dalam	31,792,308	10,310,530	42,102,838
229	7	Suka Maju	31,792,308	18,020,728	49,813,036
230	8	Sukarame	31,792,308	16,516,026	48,308,334
231	9	Bandar Jaya	31,792,308	10,300,538	42,092,846
XXIV NGAMBUR					
232	1	Sumber Agung	31,792,308	22,418,369	54,210,677
233	2	Ulok Mukti	31,792,308	36,719,827	68,512,135
234	3	Negeri Ratu Ngambur	31,792,308	45,677,565	77,469,873
235	4	Pekon Mon	31,792,308	35,589,754	67,382,062
236	5	Gedung Cahaya Kuningan	31,792,308	31,280,014	63,072,322
237	6	Suka Banjar	31,792,308	26,386,258	58,178,566
238	7	Suka Negara	31,792,308	19,063,154	50,855,462
239	8	Muara Tembulih	31,792,308	12,304,860	44,097,168
240	9	Bumi Ratu	31,792,308	23,032,468	54,824,776
XXV BENGKUNAT BELIMBING					
241	1	Pagar Bukit	31,792,308	52,011,437	83,803,745
242	2	Tanjung Kemala	31,792,308	29,332,568	61,124,876
243	3	Suka Marga	31,792,308	39,210,709	71,003,017
244	4	Kota Jawa	31,792,308	30,069,795	61,862,103
245	5	Penyandingan	31,792,308	26,486,192	58,278,500
246	6	Bandar Dalam	31,792,308	45,004,689	76,796,997
247	7	Way Haru	31,792,308	40,243,662	72,035,970
248	8	Pemerihan	31,792,308	26,004,608	57,796,916
249	9	Suka Negeri	31,792,308	26,244,263	58,036,571
250	10	Sumberejo	31,792,308	28,392,593	60,184,901
251	11	Siring Gading	31,792,308	23,716,661	55,508,969
252	12	Way Tias	31,792,308	22,946,798	54,739,106
253	13	Tanjung Rejo	31,792,308	20,031,666	51,823,974
254	14	Pagar Bukit Induk	31,792,308	14,892,565	46,684,873
JUMLAH			7,852,700,100	5,235,133,400	13,087,833,500

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN	
4	Badan PM & PP	<i>[Signature]</i>
5	Inspektorat	<i>[Signature]</i>
6	Bappeda	<i>[Signature]</i>
7	Din. PPKAD	<i>[Signature]</i>
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MUKHLIS BASRI

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BESARAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) PADA 247 PEKON
UNTUK ALOKASI DANA PEKON MINIMAL (ADPM) / (30%) DAN
ALOKASI DANA PEKON PROPORSIONAL (ADPM) / (70%)

NO	KECAMATAN PEKON / KELURAHAN	DPKPM	DPKPPx	JUMLAH
		30% (Rupiah)	70% (Rupiah)	ADP (Rupiah)
1	2	3	4	5
	SUMBERJAYA			
1	1 Simpang Sari	19,326,349	45,094,815	64,421,164
2	2 Sukapura	18,001,291	42,003,013	60,004,304
3	3 Way Petai	20,370,527	47,531,229	67,901,756
4	4 Sukajaya	15,869,347	37,028,477	52,897,824
5	5 Sindang Pagar	21,556,003	50,297,341	71,853,344
6	6 Tugu Sari	Kelurahan		
	KEBUN TEBU			
7	1 Tribudi Syukur	15,456,547	36,065,277	51,521,825
8	2 Pura Jaya	17,360,508	40,507,851	57,868,359
9	3 Muara Jaya I	14,544,933	33,938,176	48,483,108
10	4 Muara Jaya II	14,665,553	34,219,623	48,885,175
11	5 Purawiwitan	16,205,675	37,813,241	54,018,915
12	6 Sinar Luas	14,262,566	33,279,320	47,541,886
13	7 Cipta Mulya	13,932,125	32,508,292	46,440,418
14	8 Tugu Mulya	13,416,509	31,305,188	44,721,697
15	9 Muara Baru	13,219,425	30,845,325	44,064,749
16	10 Tribudi Makmur	13,062,993	30,480,317	43,543,310
	GEDUNG SURIAN			
17	1 Gedung Surian	18,199,251	42,464,920	60,664,171
18	2 Tri Mulyo	17,907,164	41,783,383	59,690,548
19	3 Cipta Waras	15,757,803	36,768,208	52,526,011
20	4 Pura Mekar	19,419,472	45,312,101	64,731,573
21	5 Mekar Jaya	19,432,438	45,342,356	64,774,794
	WAY TENONG			
22	1 Puralaksana	18,204,262	42,476,612	60,680,874
23	2 Karang Agung	18,053,976	42,125,944	60,179,920
24	3 Mutar Alam	16,141,029	37,662,401	53,803,430
25	4 Tanjung Raya	16,687,802	38,938,204	55,626,006
26	5 Sukananti	17,633,133	41,143,976	58,777,109
27	6 Sukaraja	16,684,881	38,931,390	55,616,271
28	7 Padang Tambak	18,444,996	43,038,324	61,483,320
29	8 Tambak Jaya	17,031,170	39,739,397	56,770,567
30	9 Fajar Bulan	Kelurahan		
	AIR HITAM			
31	1 Sri Menanti	14,014,268	32,699,959	46,714,228
32	2 Suka Damai	14,107,394	32,917,254	47,024,648
33	3 Manggarai	15,205,902	35,480,439	50,686,341
34	4 Rigit Jaya	14,420,597	33,648,059	48,068,656
35	5 Sinar Jaya	13,818,439	32,243,025	46,061,464
36	6 Sidodadi	14,240,477	33,227,780	47,468,257
37	7 Semarang Jaya	15,100,899	35,235,431	50,336,330
38	8 Sumber Alam	16,248,032	37,912,074	54,160,106
39	9 Gunung Terang	14,988,985	34,974,297	49,963,282
40	10 Sukajadi	13,984,412	32,630,295	46,614,707
	SEKINCAU			
41	1 Pampong	31,893,161	74,417,375	106,310,536
42	2 Giham Sukamaju	31,637,743	73,821,400	105,459,143
43	3 Sekincau	Kelurahan		
44	4 Waspada	19,315,988	45,070,638	64,386,625
45	5 Tiga Jaya	22,296,310	52,024,723	74,321,037

SKPD KABAG HUKUM

[Signature]

	VII	PAGAR DEWA		
46	1	Mekar Sari	21,740,593	50,728,051
47	2	Sidomulyo	29,638,825	69,157,259
48	3	Pahayu Jaya	25,214,175	58,833,075
49	4	Basungan	27,074,567	63,173,990
50	5	Sidodadi	19,394,207	45,253,149
51	6	Batu Api	14,419,737	33,646,054
52	7	Suka Jaya	16,409,428	38,288,665
53	8	Pagar Dewa	16,329,415	38,101,969
54	9	Suka Mulya	14,903,879	34,775,718
55	10	Marga Jaya	15,778,643	36,816,834
	VIII	SUOH		
56	1	Tuguratu	19,152,096	44,688,225
57	2	Sukamarga	19,089,459	44,542,071
58	3	Sumber Agung	16,793,362	39,184,511
59	4	Banding Agung	18,303,556	42,708,297
60	5	Roworejo	19,745,918	46,073,808
61	6	Sido Rejo	15,516,079	38,204,184
62	7	Ringin Sari	14,321,382	33,416,557
	IX	BANDAR NEGERI SUOH		
63	1	Bandar Agung	37,955,502	88,562,838
64	2	Srimulyo	16,023,853	37,388,990
65	3	Suoh	21,125,285	49,292,331
66	4	Bumi Hantatai	20,159,293	47,038,350
67	5	Gunung Ratu	15,088,750	35,207,084
68	6	Ringin Jaya	15,792,443	36,849,034
69	7	Tri Mekar Jaya	14,538,525	33,923,225
70	8	Tembelang	14,949,724	34,882,689
71	9	Negeri Jaya	14,694,248	34,286,579
72	10	Tanjung Sari	13,351,379	31,153,217
	X	BELALAU		
73	1	Kenali	25,945,448	60,539,380
74	2	Kejadian	13,630,892	31,805,415
75	3	Bumi Agung	13,020,288	30,380,673
76	4	Turgak	18,164,272	42,383,300
77	5	Bedudu	14,827,072	34,596,502
78	6	Sukarame	14,304,841	33,377,963
79	7	Hujung	19,616,801	45,772,536
80	8	Serungkuk	15,695,075	36,621,841
81	9	Suka Makmur	16,786,692	39,168,947
82	10	Pajar Agung	12,304,502	28,710,505
	XI	BATU KETULIS		
83	1	Bakhu	22,065,333	51,485,778
84	2	Luas	22,827,018	53,263,043
85	3	Argo Mulyo	20,353,550	47,491,616
86	4	Batu Kebayan	19,910,808	46,458,552
87	5	Atar Bawang	13,950,489	32,551,141
88	6	Campang Tiga	16,560,144	38,640,336
89	7	Way Ngison	13,436,519	31,351,877
90	8	Kubu Liku Jaya	13,140,868	30,662,026
91	9	Sumber Rejo	11,864,206	27,683,147
92	10	Atar Kuwau	13,557,090	31,633,210
	XII	BATU BRAK		
93	1	Negeri Ratu	14,040,179	32,760,418
94	2	Kembahang	14,738,354	34,389,492
95	3	Sukaraja	12,362,245	28,845,239
96	4	Gunung Sugih	12,319,010	28,744,356
97	5	Kegeringan	14,472,076	33,768,178
98	6	Canggu	13,622,919	31,786,811
99	7	Kota Besi	15,099,487	35,232,136
100	8	Sukabumi	14,914,216	34,799,838
101	9	Pekon Balak	13,586,469	31,701,760
102	10	Kerang	11,729,611	27,369,093
		Teba Liokh	12,938,378	30,189,548

SKPD **KEBAG
HUKUM**

KL *RL*

	XIII	SUKAU		
104	1	Tanjung Raya	23,643,144	55,167,336
105	2	Hanakau	16,948,451	39,546,386
106	3	Buay Nyerupa	22,578,534	52,683,247
107	4	Tapak Siring	17,724,238	41,356,556
108	5	Pagar Dewa	15,782,482	36,825,792
109	6	Jaga Raga	15,847,261	36,976,943
110	7	Suka Mulya	15,211,390	35,493,244
111	8	Bandar Baru	15,819,888	36,913,072
112	9	Bumi Jaya	14,099,966	32,899,920
113	10	Teba Pering Raya	15,238,569	35,556,661
	XIX	LUMBOK SEMINUNG		
114	1	Suka Banjar	13,563,699	31,648,631
115	2	Lornbok	14,743,205	34,400,812
116	3	Heni Arong	14,608,197	34,085,794
117	4	Suka Banjar II UR	15,463,294	36,081,019
118	5	Lombok Timur	13,942,093	32,531,551
119	6	Tawan Suka Mulya	13,136,092	30,650,880
120	7	Ujung	13,753,758	32,092,101
121	8	Kagungan	11,933,228	27,844,199
122	9	Suka Maju	11,922,642	27,819,498
123	10	Lombok Selatan	11,684,882	27,264,725
124	11	Pancur Mas	12,728,875	29,700,708
	XV	PESISIR TENGAH		
125	1	Way Redak	13,261,605	30,943,746
126	2	Seray	14,552,505	33,955,845
127	3	Kampung Jawa	14,712,861	34,330,009
128	4	Rawas	13,918,226	32,475,860
129	5	Suka Negara	13,029,902	30,403,106
130	6	Pahmungan	14,071,874	32,834,374
131	7	Pasar Krui	Kelurahan	44,205,351
132	8	Pasar Kota Krui	Kelurahan	48,508,350
	XVI	WAY KRUI		
133	1	Pajar Bulan	12,237,779	28,554,817
134	2	Bumi Waras	11,953,419	27,891,311
135	3	Penggawa Lima Ilir	12,990,561	30,311,308
136	4	Banjar Agung	12,082,539	28,145,924
137	5	Ulu Krui	14,329,995	33,436,654
138	6	Gunung Kemala	14,024,252	32,723,254
139	7	Suka Baru	13,043,339	30,434,459
140	8	Labuhan Mandi	13,043,865	30,435,685
141	9	Gunung Kemala Timur	12,443,857	29,035,666
142	10	Penggawa Lima	11,960,831	27,908,606
	XVII	KRUI SELATAN		
143	1	Balai Kencana	31,792,308	17,640,444
144	2	Way Suluh	31,792,308	14,018,683
145	3	Way Napal	31,792,308	13,806,839
146	4	Padang Haluan	31,792,308	13,633,811
147	5	Lintik	31,792,308	14,464,974
148	6	Walur	31,792,308	8,149,828
149	7	Pemerihan	31,792,308	10,954,298
150	8	Mandiri Sejati	31,792,308	7,942,544
151	9	Padang Raya	31,792,308	10,343,200
152	10	Sukajadi	31,792,308	9,496,861
	XVIII	PESISIR SELATAN		
153	1	NR Tenumbang	13,652,013	31,854,697
154	2	Sukarame	12,036,724	28,085,689
155	3	Pelita Jaya	13,260,701	30,941,636
156	4	Sumur Jaya	14,147,308	33,010,386
157	5	Tanjung Jati	11,766,379	27,454,884
158	6	Pagar Dalam	11,910,725	27,791,692
159	7	Tanjung Setia	13,829,943	32,269,866
160	8	Biha	15,779,045	36,817,771

SKPD | KABAG HUKUM

R/

161	9	Way Jambu	14,404,056	33,609,465	48,013,522
162	10	Marang	21,393,290	49,917,676	71,310,966
163	11	Tanjung Raya	13,000,370	30,334,196	43,334,566
164	12	Bangun Negara	13,249,936	30,916,518	44,166,454
165	13	Ulok Manik	13,390,982	31,245,625	44,636,607
166	14	Paku Negara	15,286,156	35,667,698	50,953,854
167	15	Tulung Bamban	12,435,074	29,015,173	41,450,247
XIX PESISIR UTARA					
168	1	Walur	15,289,403	35,675,275	50,964,678
169	2	Padang Rindu	13,988,710	32,640,322	46,629,032
170	3	Kuripan	14,128,568	32,966,659	47,095,227
171	4	Negeri Ratu	15,431,346	36,006,475	51,437,821
172	5	Kerbang Langgar	15,184,553	35,430,624	50,615,177
173	6	Kerbang Dalam	13,789,215	32,174,834	45,964,048
174	7	Balam	14,326,121	33,427,617	47,753,738
175	8	Way Narta	13,896,526	32,425,228	46,321,754
176	9	Kota Karang	15,536,720	36,252,347	51,789,067
177	10	Batu Raja	14,415,998	33,637,329	48,053,328
178	11	Pasar Pulau Pisang	14,707,460	34,317,407	49,024,867
179	12	Labuhan	14,375,679	33,543,250	47,918,929
180	13	Sukadana	13,587,119	31,703,277	45,290,396
181	14	Sukamarga	13,169,453	30,728,724	43,898,177
182	15	Pekon Lok	12,828,727	29,933,696	42,762,423
183	16	Bandar Dalam	13,210,796	30,825,191	44,035,987
184	17	Pemancar	14,615,730	34,103,370	48,719,100
185	18	Gedau	14,138,727	32,990,364	47,129,091
XX LEMONG					
186	1	Pagar Dalam	15,178,024	35,415,389	50,593,412
187	2	Bambang	15,383,628	35,895,132	51,278,760
188	3	Tanjung Jati	13,753,131	32,090,639	45,843,771
189	4	Way Batang	14,428,439	33,666,359	48,094,798
190	5	Rata Agung	19,808,808	46,220,553	66,029,361
191	6	Lemong	18,343,146	42,800,674	61,143,820
192	7	Penengahan	19,635,077	45,815,179	65,450,256
193	8	Malaya	17,686,495	41,268,489	58,954,984
194	9	Cahaya Negeri	14,235,007	33,215,015	47,450,022
195	10	Bandar Pugung	15,011,284	35,026,330	50,037,614
196	11	Tanjung Sakti	13,454,885	31,394,731	44,849,615
197	12	Suka Mulya	14,777,571	34,480,999	49,258,570
198	13	Parda Haga	13,550,125	31,616,959	45,167,084
XXI KARYA PENGGAWA					
199	1	Menyancang	13,332,698	31,109,628	44,442,326
200	2	Penggawa V Tengah	12,982,603	30,292,741	43,275,345
201	3	La'ay	12,935,276	30,182,310	43,117,586
202	4	Penggawa V Ulu	13,991,478	32,646,782	46,638,260
203	5	Penengahan	15,129,596	35,302,391	50,431,988
204	6	Kebuayan	12,553,811	29,292,226	41,846,037
205	7	Way Nukak	13,276,295	30,978,021	44,254,316
206	8	Way Sindi	15,588,693	36,373,617	51,962,310
207	9	Way Sindi Utara	12,965,767	30,253,455	43,219,222
208	10	Tembakak Way Sindi	13,851,408	32,319,953	46,171,361
209	11	Way Sindi Hanuan	12,708,790	29,653,843	42,362,632
210	12	Asahan Way Sindi	13,617,053	31,773,124	45,390,177
XXII BALIK BUKIT					
211	1	Bahway	20,532,628	47,909,465	68,442,092
212	2	Padang Dalom	13,264,368	30,950,192	44,214,560
213	3	Sukarame	17,538,945	40,924,205	58,463,150
214	4	Sebarus	14,751,974	34,421,272	49,173,246
215	5	Watas	14,069,823	32,829,588	46,899,411
216	6	Way Empulau Ulu	15,084,248	35,196,578	50,280,825
217	7	Gunung Sugih	13,502,745	31,506,405	45,009,150
218	8	Pasar Liwa	Kelurahan		
219	9	Kubu Perahu	14,961,734	34,910,713	49,872,447

220	10	Padang Cahya	21,508,303	50,186,041	71,694,344
221	11	Way Mengaku	Kelurahan		
222	12	Sedampah Indah	15,111,976	35,261,278	50,373,254
XXIII BENGKUNAT					
223	1	Parda Suka	15,480,783	36,121,827	51,602,611
224	2	Negeri Ratu Ngaras	16,524,653	38,557,524	55,082,177
225	3	Kota Batu	16,061,821	37,477,583	53,539,405
226	4	Mulang Maya	14,917,010	34,806,356	48,723,366
227	5	Raja Basa	16,583,036	38,693,750	55,276,786
228	6	Padang Dalam	12,630,851	29,471,987	42,102,838
229	7	Suka Maju	14,943,911	34,869,125	49,813,036
230	8	Sukarame	14,492,500	33,815,834	48,308,334
231	9	Bandar Jaya	12,627,854	29,464,992	42,092,846
XXIV NGAMBUR					
232	1	Sumber Agung	16,263,203	37,947,474	54,210,677
233	2	Ulok Mukti	20,553,640	47,958,494	68,512,135
234	3	Negeri Ratu Ngambur	23,240,962	54,228,911	77,469,873
235	4	Pekon Mon	20,214,619	47,167,443	67,382,062
236	5	Gedung Cahaya Kuningan	18,921,697	44,150,626	63,072,322
237	6	Suka Banjar	17,453,570	40,724,996	58,178,566
238	7	Suka Negara	15,256,639	35,598,824	50,855,462
239	8	Muara Tembulih	13,229,150	30,868,017	44,097,168
240	9	Bumi Ratu	16,447,433	38,377,343	54,824,776
XXV BENGKUNAT BELIMBING					
241	1	Pagar Bukit	25,141,124	58,662,622	83,803,745
242	2	Tanjung Kemala	18,337,463	42,787,413	61,124,876
243	3	Suka Marga	21,300,905	49,702,112	71,003,017
244	4	Kota Jawa	18,558,631	43,303,472	61,862,103
245	5	Penyandingan	17,483,550	40,794,950	58,278,500
246	6	Bandar Dalam	23,039,099	53,757,898	76,796,997
247	7	Way Haru	21,610,791	50,425,179	72,035,970
248	8	Pemerihan	17,339,075	40,457,841	57,796,916
249	9	Suka Negeri	17,410,971	40,625,599	58,036,571
250	10	Sumberejo	18,055,470	42,129,431	60,184,901
251	11	Siring Gading	16,652,691	38,856,278	55,508,969
252	12	Way Tias	16,421,732	38,317,374	54,739,106
253	13	Tanjung Rejo	15,547,192	36,276,782	51,823,974
254	14	Pagar Bukit Induk	14,005,462	32,679,411	46,684,873
JUMLAH			4,112,760,761	8,975,072,739	13,087,833,500

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	✓
2	ASSISTEN 1	✓
3	ASSISTEN	
4	Badan PM&PP	✓
5	Inspektorat	✓
6	Bappeda	✓
7	Din. PPKAD	✓
8		
9		
10	KABAG HUKUM	✓

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL: 1 APRIL 2011

TENTANG: ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BESARAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) PADA 247 PEKON
UNTUK 50 % TAHAP I (KESATU) DAN TAHAP II (KEDUA) 50 %

NO	KECAMATAN	JUMLAH ADP	JUMLAH ADP	JUMLAH ADP	JUMLAH ADP
		PEKON/KELURAHAN	(Rupiah)	(Pembulatan ke Bawah)	50% (Rupiah)
1	2	3	4	4	5
1	I SUMBERJAYA				
1	1 Simpang Sari	64,421,164	64,421,150	32,210,575	32,210,575
2	2 Sukapura	60,004,304	60,004,300	30,002,150	30,002,150
3	3 Way Petai	67,901,756	67,901,750	33,950,875	33,950,875
4	4 Sukajaya	52,897,824	52,897,800	26,448,900	26,448,900
5	5 Sindang Pagar	71,853,344	71,853,300	35,926,650	35,926,650
6	6 Tugu Sari	Kelurahan			
	II KEBUN TEBU				
7	1 Tribudi Syukur	51,521,825	51,521,800	25,760,900	25,760,900
8	2 Pura Jaya	57,868,359	57,868,350	28,934,175	28,934,175
9	3 Muara Jaya I	48,483,108	48,483,100	24,241,550	24,241,550
10	4 Muara Jaya II	48,885,175	48,885,150	24,442,575	24,442,575
11	5 Purawiwitan	54,018,915	54,018,900	27,009,450	27,009,450
12	6 Sinar Luas	47,541,886	47,541,850	23,770,925	23,770,925
13	7 Cipta Mulya	46,440,418	46,440,400	23,220,200	23,220,200
14	8 Tugu Mulya	44,721,697	44,721,650	22,360,825	22,360,825
15	9 Muara Baru	44,064,749	44,064,700	22,032,350	22,032,350
16	10 Tribudi Makmur	43,543,310	43,543,300	21,771,650	21,771,650
	III GEDUNG SURIAN				
17	1 Gedung Surian	60,664,171	60,664,150	30,332,075	30,332,075
18	2 Tri Mulyo	59,690,548	59,690,500	29,845,250	29,845,250
19	3 Cipta Waras	52,526,011	52,526,000	26,263,000	26,263,000
20	4 Pura Mekar	64,731,573	64,731,550	32,365,775	32,365,775
21	5 Mekar Jaya	64,774,794	64,774,750	32,387,375	32,387,375
	IV WAY TENONG				
22	1 Puralaksana	60,680,874	60,680,850	30,340,425	30,340,425
23	2 Karang Agung	60,179,920	60,179,900	30,089,950	30,089,950
24	3 Mutar Alam	53,803,430	53,803,400	26,901,700	26,901,700
25	4 Tanjung Raya	55,626,006	55,626,000	27,813,000	27,813,000
26	5 Sukananti	58,777,109	58,777,100	29,388,550	29,388,550
27	6 Sukaraja	55,616,271	55,616,250	27,808,125	27,808,125
28	7 Padang Tambak	61,483,320	61,483,300	30,741,650	30,741,650
29	8 Tambak Jaya	56,770,567	56,770,550	28,385,275	28,385,275
30	9 Fajar Bulan	Kelurahan			
	V AIR HITAM				
31	1 Sri Menanti	46,714,228	46,714,200	23,357,100	23,357,100
32	2 Suka Damai	47,024,648	47,024,600	23,512,300	23,512,300
33	3 Manggarai	50,686,341	50,686,300	25,343,150	25,343,150
34	4 Rigit Jaya	48,068,656	48,068,650	24,034,325	24,034,325
35	5 Sinar Jaya	46,061,464	46,061,450	23,030,725	23,030,725
36	6 Sidodadi	47,468,257	47,468,250	23,734,125	23,734,125
37	7 Semarang Jaya	50,336,330	50,336,300	25,168,150	25,168,150
38	8 Sumber Alam	54,160,106	54,160,100	27,080,050	27,080,050
39	9 Gunung Terang	49,963,282	49,963,250	24,981,625	24,981,625
40	10 Sukajadi	46,614,707	46,614,700	23,307,350	23,307,350
	VI SEKINCAU				
41	1 Pampangan	106,310,536	106,310,500	53,155,250	53,155,250
42	2 Giham Sukamaju	105,459,143	105,459,100	52,729,550	52,729,550
43	3 Sekincau	Kelurahan			
44	4 Waspada	64,386,625	64,386,600	32,193,300	32,193,300
45	5 Tiga Jaya	74,321,032	74,321,000	37,160,500	37,160,500

	VII	PAGAR DEWA			
46	1	Mekar Sari	72,468,645	72,468,600	36,234,300
47	2	Sidomulyo	98,796,084	98,796,050	49,398,025
48	3	Pahayu Jaya	84,047,249	84,047,200	42,023,600
49	4	Basungan	90,248,557	90,248,550	45,124,275
50	5	Sidodadi	64,647,356	64,647,350	32,323,675
51	6	Batu Api	48,065,791	48,065,750	24,032,875
52	7	Suka Jaya	54,698,093	54,698,050	27,349,025
53	8	Pagar Dewa	54,431,385	54,431,350	27,215,675
54	9	Suka Mulya	49,679,598	49,679,550	24,839,775
55	10	Marga Jaya	52,595,477	52,595,450	26,297,725
	VIII	SUOH			
56	1	Tuguratu	63,840,321	63,840,300	31,920,150
57	2	Sukamarga	63,631,530	63,631,500	31,815,750
58	3	Sumber Agung	55,977,872	55,977,850	27,988,925
59	4	Banding Agung	61,011,853	61,011,850	30,505,925
60	5	Roworejo	65,819,725	65,819,700	32,909,850
61	6	Sido Rejo	51,720,282	51,720,250	25,860,125
62	7	Ringin Sari	47,737,939	47,737,900	23,868,950
	IX	BANDAR NEGERI SUOH			
63	1	Bandar Agung	126,518,340	126,518,300	63,259,150
64	2	Srimulyo	53,412,843	53,412,800	26,706,400
65	3	Suoh	70,417,616	70,417,600	35,208,800
66	4	Bumi Hantatai	67,197,643	67,197,600	33,598,800
67	5	Gunung Ratu	50,295,834	50,295,800	25,147,900
68	6	Ringin Jaya	52,641,478	52,641,450	26,320,725
69	7	Tri Mekar Jaya	48,461,750	48,461,750	24,230,875
70	8	Tembelang	49,832,413	49,832,400	24,916,200
71	9	Negeri Jaya	48,980,827	48,980,800	24,490,400
72	10	Tanjung Sari	44,504,595	44,504,550	22,252,275
	X	BELALAU			
73	1	Kenali	86,484,828	86,484,800	43,242,400
74	2	Kejadian	45,436,307	45,436,300	22,718,150
75	3	Bumi Agung	43,400,961	43,400,950	21,700,475
76	4	Turgak	60,547,572	60,547,550	30,273,775
77	5	Bedudu	49,423,575	49,423,550	24,711,775
78	6	Sukarame	47,682,805	47,682,800	23,841,400
79	7	Hujung	65,389,337	65,389,300	32,694,650
80	8	Serungkuk	52,316,916	52,316,900	26,158,450
81	9	Suka Makmur	55,955,639	55,955,600	27,977,800
82	10	Pajar Agung	41,015,007	41,015,000	20,507,500
	XI	BATU KETULIS			
83	1	Bakhu	73,551,111	73,551,100	36,775,550
84	2	Luas	76,090,061	76,090,050	38,045,025
85	3	Argo Mulyo	67,845,166	67,845,150	33,922,575
86	4	Batu Kebayan	66,369,360	66,369,350	33,184,675
87	5	Atar Bawang	46,501,630	46,501,600	23,250,800
88	6	Campang Tiga	55,200,480	55,200,450	27,600,225
89	7	Way Ngison	44,788,395	44,788,350	22,394,175
90	8	Kubu Liku Jaya	43,802,894	43,802,850	21,901,425
91	9	Sumber Rejo	39,547,352	39,547,350	19,773,675
92	10	Atar Kuwau	45,190,301	45,190,300	22,595,150
	XII	BATU BRAK			
93	1	Negeri Ratu	46,800,598	46,800,550	23,400,275
94	2	Kembahang	49,127,845	49,127,800	24,563,900
95	3	Sukaraja	41,207,484	41,207,450	20,603,725
96	4	Gunung Sugih	41,063,365	41,063,350	20,531,675
97	5	Kegeringan	48,240,254	48,240,250	24,120,125
98	6	Canggu	45,409,730	45,409,700	22,704,850
99	7	Kota Besi	50,331,623	50,331,600	25,165,800
100	8	Sukabumi	49,714,054	49,714,050	24,857,025
101	9	Pekon Balak	45,288,229	45,288,200	22,644,100
102	10	Kerang	39,098,704	39,098,700	19,549,350
SKPD	11	Teba Liokh	43,127,925	43,127,900	21,563,950

	XIII	SUKAU			
104	1	Tanjung Raya	78,810,480	78,810,450	39,405,225
105	2	Hanakau	56,494,837	56,494,800	28,247,400
106	3	Buay Nyerupa	75,261,781	75,261,750	37,630,875
107	4	Tapak Siring	59,080,795	59,080,750	29,540,375
108	5	Pagar Dewa	52,608,274	52,608,250	26,304,125
109	6	Jaga Raga	52,824,204	52,824,200	26,412,100
110	7	Suka Mulya	50,704,635	50,704,600	25,352,300
111	8	Bandar Baru	52,732,961	52,732,950	26,366,475
112	9	Bumi Jaya	46,999,885	46,999,850	23,499,925
113	10	Teba Pering Raya	50,795,230	50,795,200	25,397,600
	XIX	LUMBOK SEMINUNG			
114	1	Suka Banjar	45,212,330	45,212,300	22,606,150
115	2	Lombok	49,144,018	49,144,000	24,572,000
116	3	Heni Arong	48,693,991	48,693,950	24,346,975
117	4	Suka Banjar II UR	51,544,313	51,544,300	25,772,150
118	5	Lombok Timur	46,473,644	46,473,600	23,236,800
119	6	Tawan Suka Mulya	43,786,972	43,786,950	21,893,475
120	7	Ujung	45,845,859	45,845,850	22,922,925
121	8	Kagungan	39,777,427	39,777,400	19,888,700
122	9	Suka Maju	39,742,140	39,742,100	19,871,050
123	10	Lombok Selatan	38,949,607	38,949,600	19,474,800
124	11	Pancur Mas	42,429,583	42,429,550	21,214,775
	XV	PESISIR TENGAH			
125	1	Way Redak	44,205,351	44,205,350	22,102,675
126	2	Seray	48,508,350	48,508,350	24,254,175
127	3	Kampung Jawa	49,042,871	49,042,850	24,521,425
128	4	Rawas	46,394,086	46,394,050	23,197,025
129	5	Suka Negara	43,433,008	43,433,000	21,716,500
130	6	Pahmungan	46,906,248	46,906,200	23,453,100
131	7	Pasar Krui	Kelurahan		
132	8	Pasar Kota Krui			
	XVI	WAY KRUI			
133	1	Pajar Bufan	40,792,596	40,792,550	20,396,275
134	2	Bumi Waras	39,844,730	39,844,700	19,922,350
135	3	Penggawa Lima Ilir	43,301,869	43,301,850	21,650,925
136	4	Banjar Agung	40,208,463	40,208,450	20,104,225
137	5	Ulu Krui	47,766,648	47,766,600	23,883,300
138	6	Gunung Kemala	46,747,506	46,747,500	23,373,750
139	7	Suka Baru	43,477,798	43,477,750	21,738,875
140	8	Labuhan Mandi	43,479,550	43,479,550	21,739,775
141	9	Gunung Kemala Timur	41,479,523	41,479,500	20,739,750
142	10	Penggawa Lima	39,869,437	39,869,400	19,934,700
	XVII	KRUI SELATAN			
143	1	Balai Kencana	49,432,752	49,432,750	24,716,375
144	2	Way Suluh	45,810,991	45,810,950	22,905,475
145	3	Way Napal	45,599,147	45,599,100	22,799,550
146	4	Padang Haluan	45,426,119	45,426,100	22,713,050
147	5	Lintik	46,257,282	46,257,200	23,128,600
148	6	Walur	39,942,136	39,942,100	19,971,050
149	7	Pemerihan	42,746,606	42,746,600	21,373,300
150	8	Mandiri Sejati	39,734,852	39,734,850	19,867,425
151	9	Padang Raya	42,135,508	42,135,500	21,067,750
152	10	Sukajadi	41,289,169	41,289,150	20,644,575
	XVIII	PESISIR SELATAN			
153	1	NR Tenumbang	45,506,710	45,506,700	22,753,350
154	2	Sukarame	40,122,413	40,122,400	20,061,200
155	3	Pelita Jaya	44,202,337	44,202,300	22,101,150
156	4	Sumur Jaya	47,157,695	47,157,650	23,578,825
157	5	Tanjung Jati	39,221,263	39,221,250	19,610,625
158	6	Pagar Dalam	39,702,417	39,702,400	19,851,200
159	7	Tanjung Setia	46,099,809	46,099,800	23,049,900
160	8	Biha	52,596,816	52,596,800	26,298,400

161	9	Way Jambu	48,013,522	48,013,500	24,006,750	24,006,750
162	10	Marang	71,310,966	71,310,950	35,655,475	35,655,475
163	11	Tanjung Raya	43,334,566	43,334,550	21,667,275	21,667,275
164	12	Bangun Negara	44,166,454	44,166,450	22,083,225	22,083,225
165	13	Ulok Manik	44,636,607	44,636,600	22,318,300	22,318,300
166	14	Paku Negara	50,953,854	50,953,850	25,476,925	25,476,925
167	15	Tulung Bamban	41,450,247	41,450,200	20,725,100	20,725,100
XIX PESISIR UTARA						
168	1	Walur	50,964,678	50,964,650	25,482,325	25,482,325
169	2	Padang Rindu	46,629,032	46,629,000	23,314,500	23,314,500
170	3	Kuripan	47,095,227	47,095,200	23,547,600	23,547,600
171	4	Negeri Ratu	51,437,821	51,437,800	25,718,900	25,718,900
172	5	Kerbang Langgar	50,615,177	50,615,150	25,307,575	25,307,575
173	6	Kerbang Dalam	45,964,048	45,964,000	22,982,000	22,982,000
174	7	Balam	47,753,738	47,753,700	23,876,850	23,876,850
175	8	Way Narta	46,321,754	46,321,750	23,160,875	23,160,875
176	9	Kota Karang	51,789,067	51,789,050	25,894,525	25,894,525
177	10	Batu Raja	48,053,326	48,053,300	24,026,650	24,026,650
178	11	Pasar Pulau Pisang	49,024,867	49,024,850	24,512,425	24,512,425
179	12	Labuhan	47,918,929	47,918,900	23,959,450	23,959,450
180	13	Sukadana	45,290,396	45,290,350	22,645,175	22,645,175
181	14	Sukamarga	43,898,177	43,898,150	21,949,075	21,949,075
182	15	Pekon Lok	42,762,423	42,762,400	21,381,200	21,381,200
183	16	Bandar Dalam	44,035,987	44,035,950	22,017,975	22,017,975
184	17	Pemancar	48,719,100	48,719,100	24,359,550	24,359,550
185	18	Gedau	47,129,091	47,129,050	23,564,525	23,564,525
XX LEMONG						
186	1	Pagar Dalam	50,593,412	50,593,400	25,296,700	25,296,700
187	2	Bambang	51,278,760	51,278,750	25,639,375	25,639,375
188	3	Tanjung Jati	45,843,771	45,843,750	22,921,875	22,921,875
189	4	Way Batang	48,094,798	48,094,750	24,047,375	24,047,375
190	5	Rata Agung	66,029,361	66,029,350	33,014,675	33,014,675
191	6	Lemong	61,143,820	61,143,800	30,571,900	30,571,900
192	7	Penengahan	65,450,256	65,450,250	32,725,125	32,725,125
193	8	Malaya	58,954,984	58,954,950	29,477,475	29,477,475
194	9	Cahaya Negeri	47,450,022	47,450,000	23,725,000	23,725,000
195	10	Bandar Pugung	50,037,614	50,037,600	25,018,800	25,018,800
196	11	Tanjung Sakti	44,849,615	44,849,600	22,424,800	22,424,800
197	12	Suka Mulya	49,258,570	49,258,550	24,629,275	24,629,275
198	13	Parda Haga	45,167,084	45,167,050	22,583,525	22,583,525
XXI KARYA PENGGAWA						
199	1	Menyancang	44,442,326	44,442,300	22,221,150	22,221,150
200	2	Penggawa V Tengah	43,275,345	43,275,300	21,637,650	21,637,650
201	3	La'ay	43,117,586	43,117,550	21,558,775	21,558,775
202	4	Penggawa V Ulu	46,638,260	46,638,250	23,319,125	23,319,125
203	5	Penengahan	50,431,988	50,431,950	25,215,975	25,215,975
204	6	Kebuayan	41,846,037	41,846,000	20,923,000	20,923,000
205	7	Way Nukak	44,254,316	44,254,300	22,127,150	22,127,150
206	8	Way Sindi	51,962,310	51,962,300	25,981,150	25,981,150
207	9	Way Sindì Utara	43,219,222	43,219,200	21,609,600	21,609,600
208	10	Tembakak Way Sindi	46,171,361	46,171,350	23,085,675	23,085,675
209	11	Way Sindì Hanuan	42,362,632	42,362,600	21,181,300	21,181,300
210	12	Asahan Way Sindì	45,390,177	45,390,150	22,695,075	22,695,075
XXII BALIK BUKIT						
211	1	Bahway	68,442,092	68,442,050	34,221,025	34,221,025
212	2	Padang Dalom	44,214,560	44,214,550	22,107,275	22,107,275
213	3	Sukarame	58,463,150	58,463,150	29,231,575	29,231,575
214	4	Sebarus	49,173,246	49,173,200	24,586,600	24,586,600
215	5	Watas	46,899,411	46,899,400	23,449,700	23,449,700
216	6	Way Empulau Ulu	50,280,825	50,280,800	25,140,400	25,140,400
217	7	Gunung Sugih	45,009,150	45,009,150	22,504,575	22,504,575
218	8	Pasar Liwa	Kelurahan	49,872,400	24,936,200	24,936,200
219	9	Kubu Perahu				

220	10	Padang Cahya	71,694,344	71,694,300	35,847,150	35,847,150
221	11	Way Mengaku	Kelurahan			
222	12	Sedampah Indah	50,373,254	50,373,250	25,186,625	25,186,625
XXIII BENGKUNAT						
223	1	Parda Suka	51,602,611	51,602,600	25,801,300	25,801,300
224	2	Negeri Ratu Ngaras	55,082,177	55,082,150	27,541,075	27,541,075
225	3	Kota Batu	53,539,405	53,539,400	26,769,700	26,769,700
226	4	Mulang Maya	49,723,366	49,723,350	24,861,675	24,861,675
227	5	Raja Basa	55,276,786	55,276,750	27,638,375	27,638,375
228	6	Padang Dalam	42,102,838	42,102,800	21,051,400	21,051,400
229	7	Suka Maju	49,813,036	49,813,000	24,906,500	24,906,500
230	8	Sukarame	48,308,334	48,308,300	24,154,150	24,154,150
231	9	Bandar Jaya	42,092,846	42,092,800	21,046,400	21,046,400
XXIV NGAMBUR						
232	1	Sumber Agung	54,210,677	54,210,650	27,105,325	27,105,325
233	2	Ulok Mukti	68,512,135	68,512,100	34,256,050	34,256,050
234	3	Negeri Ratu Ngambur	77,469,873	77,469,850	38,734,925	38,734,925
235	4	Pekon Mon	67,382,062	67,382,050	33,691,025	33,691,025
236	5	G. Cahaya Kuningan	63,072,322	63,072,300	31,536,150	31,536,150
237	6	Suka Banjar	58,178,566	58,178,550	29,089,275	29,089,275
238	7	Suka Negara	50,855,462	50,855,450	25,427,725	25,427,725
239	8	Muara Tembulih	44,097,168	44,097,150	22,048,575	22,048,575
240	9	Bumi Ratu	54,824,776	54,824,750	27,412,375	27,412,375
XXV B. BELIMBING						
241	1	Pagar Bukit	83,803,745	83,803,700	41,901,850	41,901,850
242	2	Tanjung Kemala	61,124,876	61,124,850	30,562,425	30,562,425
243	3	Suka Marga	71,003,017	71,003,000	35,501,500	35,501,500
244	4	Kota Jawa	61,862,103	61,862,100	30,931,050	30,931,050
245	5	Penyandingan	58,278,500	58,278,500	29,139,250	29,139,250
246	6	Bandar Dalam	76,796,997	76,796,950	38,398,475	38,398,475
247	7	Way Haru	72,035,970	72,035,950	36,017,975	36,017,975
248	8	Pemerihan	57,796,916	57,796,900	28,898,450	28,898,450
249	9	Suka Negeri	58,036,571	58,036,550	29,018,275	29,018,275
250	10	Sumberejo	60,184,901	60,184,900	30,092,450	30,092,450
251	11	Siring Gading	55,508,969	55,508,950	27,754,475	27,754,475
252	12	Way Tias	54,739,106	54,739,100	27,369,550	27,369,550
253	13	Tanjung Rejo	51,823,974	51,823,950	25,911,975	25,911,975
254	14	Pagar Bukit Induk	46,684,873	46,684,850	23,342,425	23,342,425
JUMLAH			13,087,833,500	13,087,827,600	6,543,913,800	6,543,913,800
Saldo Pada Kas Daerah :				5,900		

Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Saldo Formulasi Perhitungan | : Rp. 0 |
| 2. Saldo Pembulatan ke Bawah | : Rp. 5.900 + |
| 3. Saldo Pada Kas Daerah | : Rp. 5.900 |

PARAF KOORDINASI	
1. KUA/LAB	<i>[Signature]</i>
2. ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
3. ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
4. Badan PM & PP	<i>[Signature]</i>
5. Inspektorat	<i>[Signature]</i>
6. Bappeda	<i>[Signature]</i>
7. Dir. PPKAD	<i>[Signature]</i>
8.	
9.	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]
MUKHLIS BASRI